

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY
SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYALURAN KUR PADA UMKM
DI YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

Putri Indahsari

19213003

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY
SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYALURAN KUR PADA UMKM
DI YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Putri Indahsari

19213003

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR
PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY
SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYALURAN KUR PADA UMKM
DI YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Nama : Putri Indahsari
No. Mahasiswa : 19213003
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 11 Juni 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M.', is written over a horizontal line.

(Nur Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M.)

Ketua Program Studi



(Dra. Diana Wijayanti, M.Si.)

Dosen Penguji

(Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., MM.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

Saya Putri Indahsari menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dengan sungguh-sungguh ditulis dan tidak ada bagian yang merupakan hasil penjiplakan dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2022

Penulis



Putri Indahsari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'Alamin, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpah dan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY Sebagai Mediator Dalam Penyaluran KUR Pada UMKM di Yogyakarta”** dengan lancar. Serta mari panjatkan sholawat dengan salam kepada baginda nabi kita Muhammad SAW agar mendapat syafaat Beliau di Yaumul Mahsyar. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat supaya dapat menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini membutuhkan usaha yang keras. Maka saya mengakui bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis mengucapkan banyak terimakasih serta mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat:

1. Ibu Tukiye/Miranda selaku orang tua dan sdr Sunarko selaku kakak yang selalu memberikan doa serta *support* dalam menyelesaikan Laporan Tugas akhir ini.

2. Bapak Tsamany dan Ibu Semi selaku kakek dan nenek yang selalu memberikan doa dan restunya.
3. Sdr Sunaryo, Bagas Putra Cahya Akbar serta seluruh keluarga besar Harno Sumarto yang selalu memberi dukungan serta selalu menghibur.
4. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing selama masa perkuliahan.
5. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Magang dan Tugas Akhir yang selalu memberikan arahan selama proses penyelesaian Tugas Akhir.
6. Seluruh Bapak Ibu dosen Diploma III Program Studi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Ibu Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY yang telah memberikan izin magang.
8. Ibu Hellen Phornica, STP., M.Si selaku pembimbing lapangan selama magang di Dinas Koperasi dan UKM DIY.
9. Bapak Kuntarta S, Sos., M.A.P., Ibu Rosalia Kurnia Handari dan Ibu Rizki Octaviani serta seluruh karyawan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.

10. Yeni Fitriani, Nanda Cindy Hendaliani, Feby Astuti, Siti Nur Halizah, dan Farhan Kurniawan selaku teman yang selalu memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.2.1 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.2.2 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6
2.1.1 Pengertian UMKM	6
2.1.2 Tujuan UMKM	6
2.1.3 Jenis-Jenis UMKM	7
2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)	8
2.2.1 Pengertian KUR	8
2.2.2 Tujuan KUR	9
2.2.3 Jenis-Jenis KUR	9
2.3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10
2.3.1 Pengertian	10
2.3.2 Tugas Dinas Koperasi dan UKM	11
2.3.3 Fungsi Dinas Koperasi dan UKM	11
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	13
3.1 Data Umum	13
3.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY	13
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY	13

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY	14
3.1.4 Layanan di Dinas Koperasi dan UKM DIY	17
3.2 Data Khusus	18
3.2.1 Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY Sebagai Mediator Dalam Penyaluran KUR Bagi Pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	18
3.2.2 Manfaat Menjadi Anggota Binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam Melakukan Akses Pembiayaan KUR.	22
BAB IV PENUTUP.....	31
Kesimpulan	31
Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	35



DAFTAR TABEL

Table 1 Data Pengguna Kredit Usaha Rakyat.....20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY.....15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan Sosialisasi KUR.....30



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2022) jumlah pengangguran pada tahun 2022 sebesar 0,96 juta orang akibat covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa pada berbagai sektor, salah satunya sektor UMKM dimana aktivitas bisnis mengalami penurunan minat beli yang sangat drastis, bahkan hingga penutupan sementara yang bisa berkelanjutan dan mengakibatkan UMKM gulung tikar atau bangkrut (Lestari, 2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam pemerataan pendapatan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, serta bertujuan dalam mewujudkan ekonomi yang stabil (Sitoro, 2022). UMKM ialah suatu kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikelola baik badan usaha maupun perorangan (Suryanti et al., 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah jenis usaha atau bisnis yang dijalankan secara *individual* atau perorangan maupun sebagai badan usaha kecil dimana mampu memegang pilar peranan penting bagi kontribusi perekonomian Indonesia. Peralannya UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97% dari total tenaga kerja dan 60,4% dari total investasi, serta UMKM dapat memanfaatkan sumber daya alam dalam suatu usahanya. Berdasarkan hal tersebut UMKM berkontribusi sangat besar dalam pendapatan daerah dan berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi negara (Kementrian Investasi/BKPM, 2021).

Upaya pemerintah untuk memberi bantuan berupa bahan pangan dan uang pun terus mengalir demi keberlanjutan hidup masyarakatnya, namun hal tersebut tetap belum dapat membuat roda perekonomian terus berjalan. Pemerintah mencetuskan suatu tatanan atau kebiasaan baru yang disebut era *new normal* untuk memulihkan roda perekonomian di Indonesia. Di era *new normal* semua kegiatan telah diperbolehkan kembali secara normal namun tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipatuhi salah satunya adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Diberlakukannya penyesuaian bagi masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalani aktivitas dimasa pandemi sesuai dengan protokol maka akan diberikan sanksi atau efek jera (Muhyiddin Muhyiddin, 2020). Banyak pelaku UMKM yang bingung untuk memulai membuka kembali usahanya. Mengingat pentingnya peran UMKM dalam hal meningkatkan roda perekonomian negara. Pemerintah telah meningkatkan subsidi pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka memperkuat peran UMKM dalam meningkatkan roda perekonomian negara. KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang belum bersifat *bankable* dan diberikan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah oleh perbankan dengan bunga yang rendah (Mulyati, 2022).

Pemerintah telah mensubsidi semua produk KUR yang ada di perbankan untuk disalurkan ke para pelaku UMKM. Terutama pada bank plat merah dimana mereka harus mampu menyalurkan produk KUR tersebut dengan merata. Pemerintah resmi menaikkan plafon pinjaman dari Rp285 triliun hingga menjadi Rp 373,17 triliun. Pemerintah juga mensubsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir tahun 2022. Harapan pemerintah dengan adanya subsidi tersebut dapat membantu para pelaku

UMKM sehingga roda perekonomian negara terus berjalan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM DIY mendukung penuh atas gerakan pemerintah tersebut dengan terus mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan pembiayaan melalui KUR (Catriana, 2022).

Menurut (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85, 2021) tugas Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM DIY berperan aktif dalam membantu penyaluran KUR untuk modal para pelaku UMKM terbukti dengan adanya peningkatan peminat pembiayaan dari tahun sebelumnya. Walaupun demikian masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami mengenai produk KUR sehingga masyarakat banyak yang belum melakukan pembiayaan KUR tersebut, sehingga Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan perannya sebagai mediator penyalur antara lembaga keuangan dengan para pelaku UMKM dengan cara mengedukasi mengenai produk KUR yang baik.

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki sebuah tim penyuluhan dan pendampingan untuk turun langsung ke lapangan yang bertujuan dapat memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM warga Yogyakarta dengan harapan semua produk KUR dapat tersalurkan dengan merata untuk tercapainya perekonomian yang lebih baik lagi. Maka dari itu perlu dilakukan strategi edukasi yang tepat dan menjangkau sasaran yang luas.

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut maka penulis memperoleh judul Laporan Tugas Akhir “*Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DIY Sebagai Mediator Dalam Penyaluran KUR Pada UMKM di Yogyakarta*”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

1.2.1 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM DIY sebagai mediator dalam penyaluran KUR pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui manfaat menjadi anggota binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam melakukan akses pembiayaan KUR.

1.2.2 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Manfaat bagi pihak investor, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan berinvestasi dengan tepat.
2. Manfaat bagi perusahaan, diharapkan sebagai bahan pertimbangan khususnya dalam meningkatkan kinerja serta mengantisipasi terjadinya masalah.
3. Manfaat bagi akademisi, adanya penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para peneliti selanjutnya.
4. Manfaat bagi pelaku UMKM, dimudahkannya informasi tentang adanya penyaluran KUR khususnya bagi UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY.

1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Target penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

- 1 Dapat menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM DIY sebagai mediator dalam penyaluran KUR bagi pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2 Dapat menjelaskan manfaat menjadi anggota binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam melakukan akses pembiayaan KUR.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir diantaranya:

BAB 1: Pendahuluan

Bab tersebut berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, target penulisan laporan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II: Landasan Teori

Bab tersebut berisi penjelasan mengenai UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro), penjelasan tentang KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan penjelasan mengenai Dinas Koperasi dan UKM.

BAB III: Analisis Deskriptif

Bab tersebut berisi sebuah penjabaran peran Dinas Koperasi dan UKM DIY dan berbagai manfaat menjadi binaan Dinas.

BAB IV: Penutup

Bab tersebut berisi sebuah kesimpulan dan saran atas penulisan laporan tugas akhir yang telah diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan kondisi perekonomian memburuk. Badan Pusat Statiska mengungkapkan pada tahun 1998 yaitu pasca krisis ekonomi, tidak ada pengurangan pelaku UMKM namun justru malah meningkat. Dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha yang tahan banting dalam kondisi krisis ekonomi sekalipun (Suci, 2017).

2.1.1 Pengertian UMKM

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Maka pengertian UMKM adalah suatu badan usaha atau kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh perorangan atau milik sendiri dan bukan bagian dari perusahaan lain.

2.1.2 Tujuan UMKM

Tujuan UMKM adalah untuk memajukan usahanya kemudian berimbas pada perekonomian negara yang stabil, mengingat peran UMKM dalam perekonomian negara sangat penting. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun (2008) Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat beberapa tujuan umkm yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.3 Jenis-Jenis UMKM

Adanya batasan atau pengelompokan jenis UMKM, menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7, 2021) Tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kriteria UMKM menurut modal usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kriteria UMKM menurut hasil penjual tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha Kecil mempunyai hasil penjual tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Usaha Menengah mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada bulan November 2007 adalah awal mula adanya produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pada saat itu mengalami adanya beberapa perubahan skema. Untuk penggunaan skema Imbal Jasa Penjamin (IJP) terjadi pada tahun 2007 sampai 2014. Sedangkan untuk penggunaan skema subsidi bunga terjadi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang (KPPN Palangka Raya, 2019).

2.2.1 Pengertian KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu pinjaman berupa modal kerja atau investasi dengan usaha yang produktif sebagai jaminan dan diberikan kepada para pelaku baik usaha mikro kecil menengah maupun koperasi (Lisa Apriani, 2022). KUR sendiri merupakan suatu pinjaman yang bekerja sama dengan pemerintah guna mendukung UMKM dengan pemberian pinjaman berupa pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah. Produk ini ditujukan kepada usaha yang masih beroperasi tapi belum mencukupi angunan tambahannya. KUR dapat disalurkan baik secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR secara

langsung, para pelaku UMKM atau koperasi dapat langsung datang ke kantor cabang bank pelaksana guna mengakses produk KUR. Sedangkan penyaluran KUR secara tidak langsung para pelaku UMKM dapat ke lembaga mikro yang bekerja sama dengan bank pelaksana guna mengakses produk KUR (KPPN Palangka Raya, 2019).

2.2.2 Tujuan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk memberikan modal kepada usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu KUR dapat menyerap tenaga kerja dengan baik melalui UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97% dari total tenaga kerja serta 60,4% dari total investasi dan dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia dalam menjalankan usahanya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Selain itu terdapat beberapa tujuan adanya program KUR menurut (Monalisa S. Najoran, Joyce J. Rares, 2022) yaitu:

- a. Memajukan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi agar usaha dapat terus berkembang sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi baru
- b. Meluaskan akses pembiayaan untuk para pelaku UMKM dan koperasi yang sumber pembiayaan lembaga keuangan.
- c. Mengurangi tingkat kemiskinan, semakin banyak UMKM maka semakin banyak tenaga kerja yang diserap.

2.2.3 Jenis-Jenis KUR

Menurut (Lifepal, 2021) terdapat beberapa jenis KUR yaitu:

- a. KUR Mikro adalah bentuk pinjaman dengan jangka waktu 2 tahun serta memiliki batas maksimal pinjaman sebesar Rp 25 juta per debitur.
- b. KUR Ritel adalah bentuk pinjaman yang memiliki batas maksimal jangka waktu 3 tahun untuk kredit modal kerja sedangkan untuk kredit investasi maksimal memiliki jangka waktu 5 tahun. Kredit ini diberikan untuk kalangan menengah dengan batas pinjaman lebih dari Rp 25 juta hingga Rp 200 juta.
- c. KUR Penempatan TKI: upaya pemerintah dalam membantu tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, dengan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan masa kerja hingga 12 bulan. Dengan batas maksimal pinjaman Rp 25 juta per debitur.
- d. KUR khusus: biasanya ditujukan untuk para mitra usaha komoditas petani, peternakan, perkebunan serta perikanan rakyat. Dengan batas maksimal pinjaman Rp 25 juta hingga Rp 500 juta.

2.3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.3.1 Pengertian

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM merupakan suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Gubernur di bidang Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM memiliki 4 bidang yang di pimpin oleh Kepala Dinas yaitu: (Dinas Koperasi dan UKM DIY, n.d.-b)

- a. Bidang Koperasi yang meliputi Kelompok Substansi Kelembagaan Usaha, Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi.

- b. Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi Kelompok Substansi Produksi, Kelompok Substansi Pemasaran.
- c. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi Kelompok Substansi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM, Kelompok Substansi Layanan Usaha Terpadu KUKM.
- d. Bidang Pembiayaan yang meliputi Kelompok Substansi Pembiayaan Koperasi, Kelompok Substansi Pembiayaan UKM.

2.3.2 Tugas Dinas Koperasi dan UKM

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2021 bahwa tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah membantu gubernur dalam melaksanakan tugasnya di bidang koperasi dan UKM. Kepala dinas sendiri bertanggung jawab atas tugas-tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. dalam menjalankan tugas-tugasnya Kepala dinas dibantu oleh sekretariat dinas, bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah, bidang layanan kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta unit pelaksanaan teknis.

2.3.3 Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2021 pasal 5 menyatakan bahwa terdapat 12 fungsi Dinas Koperasi dan UKM diantaranya adalah:

- a. Penataan program kerja dinas.
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- c. Melaksanakan kerja sama antara koperasi dan UKM.

- d. Mampu memberikan suatu pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi, UKM.
- e. Memberikan pelayanan umum di bidang koperasi, UKM.
- f. Dapat memberdayakan antara sumber daya dengan mitra kerja di bidang koperasi dan UKM.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pengawasan di bidang koperasi dan UKM dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.
- h. Melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.
- i. Melaksanakan dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan.
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pada bidang koperasi dan UKM.
- k. Melakukan penataan laporan pelaksanaan tugas dinas.
- l. Gubernur memberikan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut DISKOPUKM DIY yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162 Tegalrejo, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 30 Juli 2018 DISKOPUKM DIY dibentuk dimana sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY bahwa DISKOPUKM DIY bertanggung jawab kepada Gubernur dan bertugas membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan dibidang koperasi dan UKM (Dinas Koperasi dan UKM DIY, n.d.-b).

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki visi yaitu:

Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM DIY juga memiliki misi sebagai berikut:

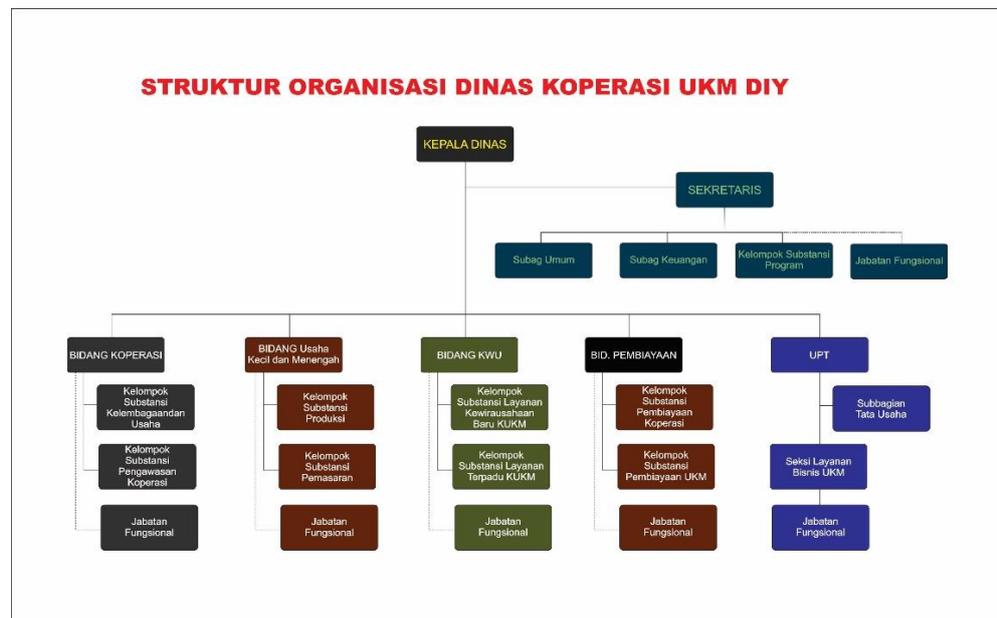
Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia”, yaitu: (Dinas Koperasi dan UKM DIY, n.d.-c)

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dalam sebuah lembaga pasti memiliki struktur organisasi yang digunakan untuk menyusun tatanan berdasarkan peran atau jabatannya agar dapat mengerjakan tugas masing-masing serta dapat mengetahui kepada siapa bertanggung jawab atas tugas tersebut. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM DIY

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bahwa Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki empat bidang dan satu unit pelaksana teknis untuk melancarkan tugas dan fungsi diantaranya:

a. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas. Bidang koperasi memiliki beberapa tugas yaitu menjalankan pembinaan, pemberdayaan hingga pengawasan pada koperasi-koperasi untuk dapat meningkatkan nilai pendapatan koperasi di sektor riil.

b. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas. Bidang Usaha Kecil Menengah memiliki tugas untuk menjalankan pembinaan serta pemberdayaan UKM dengan tujuan mampu meningkatkan nilai pendapatan bagi pelaku UKM.

c. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas. Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas untuk menjalankan pembinaan, pengembangan hingga pemantauan kewirausahaan dengan tujuan mengembangkan jumlah wairausaha baru.

d. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas. Bidang Pembiayaan memiliki tugas menjalankan pembinaan, pengendalian serta memfasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UKM.

e. Unit Pelaksana Teknis

UPT dibawah Kepala Dinas. Dipimpin oleh kepala UPT Balai Layanan Bisnis UMKM. Bertugas mengelola dan mengembangkan unit, salah satunya Teras Malioboro 1 untuk meningkatkan kualitas hingga pendapatan pedagang *ex* pedagang kaki lima Malioboro.

3.1.4 Layanan di Dinas Koperasi dan UKM DIY

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki beberapa layanan yang berguna untuk memudahkan operasionalnya sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, diantaranya: (Dinas Koperasi dan UKM DIY, n.d.-a)

a. Sibakul Jogja

Sibakul Jogja atau Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah transformasi digital yang resmi berdiri sejak tahun 2019. Sibakul Jogja dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah terhubung dengan para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Yogyakarta dengan begitu Dinas Koperasi dan UKM DIY mampu melakukan pembinaan serta pelatihan secara merata dan tepat sasaran. Sibakul Jogja juga merupakan *website* yang dikembangkan menjadi sebuah *marketplace* yang menjual atau memasarkan produk lokal.

b. MarketHub

MarketHub merupakan salah satu fitur yang ada di Sibakul Jogja dimana MarketHub sendiri adalah sebuah *marketplace* atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Selain itu, MarketHub juga menjadi tempat pemasaran produk lokal dan di fitur MarketHub juga tersedia fitur gratis ongkir dengan minimal belanja sebesar Rp 50.000,00 dan ongkir maksimal Rp 50.000,00.

c. Dampak Covid

Dampak Covid merupakan salah satu layanan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki layanan dampak

covid yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh para pelaku Koperasi dan UKM di seluruh DIY dengan cara melakukan survei.

d. PLUT DIY

PLUT DIY atau Pusat Layanan Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga penyedia jasa *non-financial* yang bekerjasama dengan Dinas koperasi dan UKM DIY. PLUT sendiri merupakan sebuah tempat yang memberikan sebuah layanan berupa pendampingan dan konsultasi secara gratis, namun bersifat mandiri karena PLUT hanya memberikan sebuah saran serta arahan yang kemudian akan dilaksanakan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Tujuan adanya jasa-jasa tersebut adalah untuk membantu meningkatkan kinerja para pelaku UMKM baik di bidang produksi, pemasaran, pembiayaan serta perkembangan sumber daya manusia.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY Sebagai Mediator Dalam Penyaluran KUR Bagi Pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Koperasi dan UKM DIY merupakan sebuah lembaga yang bertugas membantu gubernur di bidang koperasi dan ukm. Sebagai instansi pemerintah Dinas Koperasi dan UKM DIY harus mampu memberikan fasilitas serta pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY ikut serta berperan dalam penyaluran KUR sebagai mediator terhadap para pelaku UMKM yang ada di Yogyakarta. Beberapa hal yang dilakukan Dinas Koperasi dan

UKM DIY sebagai mediator dalam penyaluran KUR bagi pelaku UMKM di Yogyakarta diantaranya:

a) Sosialisasi

Dinas Koperasi dan UKM DIY mengadakan sebuah sosialisasi khusus untuk para pelaku UMKM supaya mengenal produk KUR yang telah di subsidi oleh pemerintah, dalam upaya membantu perekonomian terutama permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY mengundang seluruh pelaku UMKM di Yogyakarta untuk hadir di sosialisasi tersebut. Dinas Koperasi dan UKM DIY mendatangkan narasumber yang ahli dibidangnya untuk menjelaskan ke pelaku UMKM mengenai produk KUR, manfaat KUR hingga cara mengaksesnya. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM DIY juga melakukan kunjungan di desa pelaku UMKM untuk mengadakan sosialisasi di desa tersebut. Adanya sosialisasi ini Dinas Koperasi dan UKM DIY berharap agar pelaku UMKM di Yogyakarta dapat memanfaatkan kesempatan pinjaman yang telah disubsidi oleh pemerintah sehingga dapat membantu usahanya terutama dalam permodalan.

b) Pendampingan

Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan pendampingan ke seluruh pelaku UMKM yang sudah mengakses KUR. Pendampingan dimulai dari cara mengakses KUR hingga cara memanfaatkan pinjaman KUR dengan baik. Pendampingan tersebut berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan manajemen keuangan dan literasi keuangan yang dipandu oleh narasumber

ahli di bidangnya. Dalam hal ini para pelaku UMKM juga dapat konsultasi dan sharing mengenai kendala yang dialami serta akan mendapat solusi dan bimbingan dari para ahli. Dinas Koperasi dan UKM DIY berharap agar UMKM dapat mengakses KUR dan dapat memanfaatkan KUR yang telah mereka pinjam dengan sebaik mungkin. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM DIY juga akan melakukan monitoring setelah adanya pelatihan yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY akan mengunjungi pelaku UMKM secara langsung untuk dapat melihat perkembangannya setelah dan sesudah melakukan pembiayaan KUR.

Di wilayah Yogyakarta terdapat 521.000 pelaku UMKM yang dibagi menjadi beberapa sektor untuk mempermudah klasifikasi yang sesuai dengan kebutuhan usaha di bidang masing-masing. Mengingat setiap usaha atau sektor memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikut tabel data pengguna Kredit Usaha Rakyat pada bulan Januari-Maret 2022 di wilayah Yogyakarta diantaranya:

Tabel 1. Data Pengguna Kredit Usaha Rakyat
Tahun 2022 di Yogyakarta

NO	SEKTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET	TOTAL
1	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN				
	DEBITUR	3,011	3,475	2,653	9,139
	NILAI AKAD	100,594,100,000	138,577,500,000	104,489,750,000	343,661,350,000
	OUTSTANDING	92,503,456,643	131,304,311,412	92,305,250,000	316,113,018,055
2	PERIKANAN				
	DEBITUR	301	341	216	858
	NILAI AKAD	10,392,400,000	17,222,000,000	9,235,000,000	36,849,400,000

	OUTSTANDING	9,907,233,976	16,286,343,346	7,948,000,000	34,141,577,322
3	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN				
	DEBITUR	0	1	0	1
	NILAI AKAD	0	50,000,000	0	50,000,000
	OUTSTANDING	0	48,728,900	0	48,728,900
4	INDUSTRI PENGOLAHAN				
	DEBITUR	2,138	2,329	1,715	6,182
	NILAI AKAD	75,658,000,000	102,518,000,000	71,109,800,000	249,285,800,000
	OUTSTANDING	71,078,792,239	95,782,235,546	60,422,800,000	227,283,827,785
5	KONSTRUKSI				
	DEBITUR	15	18	15	48
	NILAI AKAD	1,877,700,000	1,353,000,000	1,589,000,000	4,819,700,000
	OUTSTANDING	1,829,643,997	1,198,422,140	1,319,000,000	4,347,066,137
6	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN				
	DEBITUR	4,896	4,681	3,485	13,062
	NILAI AKAD	214,279,490,000	242,004,900,000	170,014,970,000	626,299,360,000
	OUTSTANDING	202,066,793,274	225,266,000,020	135,499,100,000	562,831,893,294
7	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM				
	DEBITUR	562	610	425	1,597
	NILAI AKAD	36,111,000,000	42,120,000,000	24,955,000,000	103,186,000,000
	OUTSTANDING	33,255,687,471	39,598,987,168	20,315,000,000	93,169,674,639
8	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI				
	DEBITUR	69	75	35	179
	NILAI AKAD	4,539,000,000	6,497,000,000	2,177,000,000	13,213,000,000
	OUTSTANDING	4,052,837,813	5,922,381,866	2,072,000,000	12,047,219,679
9	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN				
	DEBITUR	160	193	137	490

	NILAI AKAD	11,828,166,600	14,494,000,000	7,991,000,000	34,313,166,600
	OUTSTANDING	11,383,209,776	13,115,039,813	5,995,000,000	30,493,249,589
10	JASA PENDIDIKAN				
	DEBITUR	21	13	9	43
	NILAI AKAD	214,300,000	1,603,000,000	938,000,000	2,755,300,000
	OUTSTANDING	168,287,958	1,583,884,200	900,000,000	2,652,172,158
11	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL				
	DEBITUR	19	22	13	54
	NILAI AKAD	2,509,700,000	2,336,000,000	1,175,000,000	6,020,700,000
	OUTSTANDING	2,443,170,847	1,814,773,398	520,000,000	4,777,944,245
12	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA				
	DEBITUR	1,860	1,894	1,443	5,197
	NILAI AKAD	64,433,800,000	88,032,000,000	59,514,800,000	211,980,600,000
	OUTSTANDING	61,279,291,929	85,186,806,770	51,809,900,000	198,275,998,699
	TOTAL DEBITUR	13,052	13,652	10,146	36,850
	TOTAL NILAI AKAD	522,437,656,600	656,807,400,000	453,189,320,000	1,632,434,376,600
	TOTAL OUTSTANDING	489,968,405,923	617,107,914,579	379,106,050,000	1,486,182,370,502

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY

3.2.2 Manfaat Menjadi Anggota Binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam Melakukan Akses Pembiayaan KUR.

Jumlah UMKM di Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 521.000 dan sebesar 329.723 telah tercatat menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terdapat beberapa sektor UMKM yang tergabung dalam binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY diantaranya:

- a. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan
- b. Sektor Perikanan
- c. Sektor Pertambangan dan penggalian
- d. Sektor Industri pengolahan
- e. Sektor Konstruksi
- f. Sektor Perdagangan besar dan eceran
- g. Sektor Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
- h. Sektor Transportasi, pergudangan dan komunikasi
- i. Sektor Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan
- j. Sektor Jasa Pendidikan
- k. Sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- l. Sektor Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya

Terdapat beberapa manfaat untuk pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam mengakses KUR diantaranya:

- a. Para pelaku UMKM akan mendapatkan informasi yang akurat, karena di Dinas Koperasi dan UKM DIY akan mendatangkan beberapa narasumber secara langsung dengan demikian informasi yang didapat akan lebih lengkap daripada mencari informasi sendiri. Para pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY akan mendapatkan bimbingan serta penjelasan langsung dari pihak penyedia pembiayaan KUR melalui sosialisasi dan pendampingan dengan demikian para pelaku UMKM akan lebih paham mengenai KUR.

- b. Para pelaku UMKM yang mengakses KUR melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY maka akan menjadi binaan Dinas, dengan demikian para pelaku UMKM akan mendapatkan semua fasilitas yang ada di Dinas seperti fasilitas adanya sosialisasi, pendampingan serta pelatihan dan tidak dipungut biaya sama sekali. Para pelaku UMKM akan diberikan penjelasan serta pemaparan mengenai KUR. Kemudian para pelaku UMKM yang sudah mendapatkan penjelasan serta pemaparan mengenai KUR selanjutnya akan dibimbing cara mengakses KUR dan setelah itu para pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan cara mengelola keuangan yang benar dalam sebuah usaha.
- c. Mengakses pembiayaan KUR lebih mudah. Bagi pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY akan mendapatkan sebuah bimbingan serta binaan sosialisasi dari pihak narasumber penyedia pembiayaan KUR secara langsung, sehingga UMKM binaan Dinas akan lebih mudah dalam mengakses pembiayaan KUR. Para pelaku UMKM binaan Dinas cukup mengikuti setiap sesi bimbingan sosialisasi dan ikut serta dalam proses pendaftaran yang telah dilakukan oleh pihak penyedia pembiayaan KUR pada saat itu juga. Selain itu para pelaku UMKM binaan Dinas juga akan mendapatkan perlakuan khusus dari pihak penyedia pembiayaan KUR yaitu berupa mudahnya proses melakukan pembiayaan dan syarat yang harus dipenuhi lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan KUR secara individual.

- d. Dinas Koperasi dan UKM DIY akan terus memonitoring pelaku UMKM yang mengakses KUR. Para pelaku UMKM akan terus dipantau oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY guna untuk memastikan dana pinjaman tersebut digunakan sesuai dengan semestinya atau tidak. Dinas Koperasi dan UKM DIY juga memantau mengenai perkembangan usaha para pelaku UMKM untuk mengetahui kendala yang dialami para pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan UKM DIY akan membantu dan mencarikan solusi yang tepat untuk setiap kendala yang dihadapi para pelaku UMKM agar usaha mereka tetap berjalan dengan lancar.
- e. Mendapatkan layanan konsultasi. Para pelaku UMKM dapat berkonsultasi dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY, baik secara langsung maupun secara online. Para pelaku UMKM binaan Dinas dapat datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162, Tegalrejo. Kec. Tegalrejo. Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55244 atau bisa langsung chat melalui aplikasi Sibakul Jogja. Dinas Koperasi dan UKM DIY berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Karena adanya fasilitas layanan konsultasi sangat menguntungkan dalam proses bisnis mereka dimana para pelaku UMKM dapat meminta pendapat atau sharing tentang usaha mereka serta dapat meminta solusi ke pihak Dinas dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Dinas Koperasi dan UKM DIY akan terus melakukan upgrade untuk kelancaran bisnis para pelaku UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan layanan serta fasilitas yang sangat memadai. Sehingga sangat disayangkan apabila para pelaku UMKM tidak dapat memanfaatkannya. Berikut adalah langkah-langkah menurut Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk dapat mendaftar menjadi anggota binaan Dinas melalui *website* Sibakul Jogja. Diantaranya:

Dapat diakses melalui *website* sibakuljogja.jogjaprov.go.id

1. Klik Daftar Sekarang



2. Mulai mengisi data pada halaman pertama, yaitu Data Dasar.

3. Kemudian pada halaman ke dua mengisi Data Profil Usaha.



Screenshot of the SIBakul Jogja registration page. The page title is "REGISTRASI DAN PENDATAAN" and the user is "Yudi Wahyudi". The section is "2. Profil Usaha" (Business Profile) and it is the second of eight steps. The form includes fields for "Nama Usaha / Merk*" (Business Name / Brand), "Mulai Menjalankan Usaha (tgl/bulan/tahun)*" (Start of Business (date/month/year)*), and "Alamat Usaha*" (Business Address*). The "Nama Usaha / Merk*" field is currently empty.

4. Kemudian pada halaman ke tiga untuk dapat mengisi mengenai Aspek Produksi.



Screenshot of the SIBakul Jogja registration page. The page title is "REGISTRASI DAN PENDATAAN" and the user is "Yudi Wahyudi". The section is "3. ASPEK PRODUKSI" (Production Aspect) and it is the third of eight steps. The form includes fields for "Aktifitas Produksi*" (Production Activity*), "Jumlah Produksi*" (Production Quantity*), "Kemasan yang Digunakan Memenuhi Standar untuk Keamanan Produk*" (Packaging Used to Meet Standards for Product Safety*), and "Ketersediaan Bahan Baku*" (Raw Material Availability*). The "Aktifitas Produksi*" field is currently set to "Seminggu Sekali" (Once a Week).

5. Lalu pada halaman ke empat mengisi tentang Aspek Pasar dan Pemasaran.

14:50 SIBakul Jogja | Sistem Inform... Ads

PORTAL TUTORIA SUPPORT LOGIN

SIBakul Jogja

REGISTRASI DAN PENDATAAN

07 Maret 2020
Yudi Wahyudi

4. Aspek Pasar dan Pemasaran dari 8

Mengetahui Kelebihan / Kekuatan Produk*

Tidak Mengetahui

Mengetahui Target Pasar Utama (Calon Pembeli Utama)*

Tidak Mengetahui

Produk Mudah Didapatkan Calon Pembeli Utama*

< > ☰ 🏠 📄

6. Kemudian klik Aspek Digital Marketing pada halaman ke lima.

14:51 SIBakul Jogja | Sistem Inform... Ads

PORTAL TUTORIA SUPPORT LOGIN

SIBakul Jogja

REGISTRASI DAN PENDATAAN

07 Maret 2020
Yudi Wahyudi

5. Aspek Digital Marketing dari 8

Media Chatting yang Digunakan untuk Memasarkan Produk*

Tidak Punya

Media Sosial Untuk Memasarkan Produk*

Tidak Punya

Marketplace yang Digunakan untuk Memasarkan Produk*

< > ☰ 🏠 📄

7. Lalu pada halaman ke enam mengisi Aspek Kelembagaan.

SiBakul Jogja | Sistem Inform...

PORTAL TUTORIA SUPPORT LOGIN

SiBakul Jogja

REGISTRASI DAN PENDATAAN
07 Maret 2020
Yudi Wahyudi

6. ASPEK KELEMBAGAAN dari 8

Usaha Berbadan Hukum*

Tidak Berbadan Hukum

Punya Izin Usaha*

Tidak Punya

Punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Melaporkan Pajak*

Tidak Punya NPWP

Punya Struktur Organisasi Usaha*

< > ☰ 🏠 🗨️

8. Kemudian pada halaman ke tujuh dapat mengisi data tentang Aspek Keuangan dalam usaha pribadi kita.

SiBakul Jogja | Sistem Inform...

PORTAL TUTORIA SUPPORT LOGIN

SiBakul Jogja

REGISTRASI DAN PENDATAAN
07 Maret 2020
Yudi Wahyudi

7. ASPEK KEUANGAN dari 8

Hasil Usaha Menjadi Sumber Pendapatan Utama dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga*

Tidak Menjadi Sumber Utama

Pengelolaan Keuangan Usaha Terpisah dengan Keuangan Pribadi*

Masih Tercampur

Ada Bukti Transaksi Berupa Nota / Kuitansi*

Tidak Ada

Punya Pencatatan Keuangan Usaha*

Tidak Bisa

< > ☰ 🏠 🗨️

9. Lalu dapat mengisi data mengenai Aspek Sumber Daya Manusia pada halaman ke delapan.

PORTAL TUTORIA SUPPORT LOGIN

Sibakul Jogja

REGISTRASI DAN PENDATAAN

07 Maret 2020
Yudi Wahyudi

8. Aspek Sumber Daya Manusia dari 8

Kesuksesan Bisnis Sangat Tergantung pada Diri Saya Sendiri*

Tidak

Saya Rela Menunda Pelaksanaan Kegiatan Lain Demi Fokus Mengembangkan Usaha*

Tidak

Punya Target Bulanan / Tahunan*

Tidak Punya

Punya Karyawan Tetap yang Digaji (di Luar Sub Kontrak)*

10. Kemudian jika sudah lengkap semua, klik tombol selesai. Lalu menunggu verifikasi dari admin Sibakul guna mendapatkan username dan password untuk akun Sibakul kita.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY sebagai mediator dalam penyaluran KUR pada UMKM di Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY sebagai mediator dalam penyaluran KUR pada UMKM di Yogyakarta adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai dan tanpa dipungut biaya sama sekali, melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi guna untuk mengakses KUR, melakukan monitoring terhadap pelaku UMKM yang telah mengakses KUR.
2. Manfaat menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam mengakses KUR adalah mudahnya dalam proses pencairan pinjaman KUR, syarat yang harus dipenuhi tidak terlalu banyak dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas.

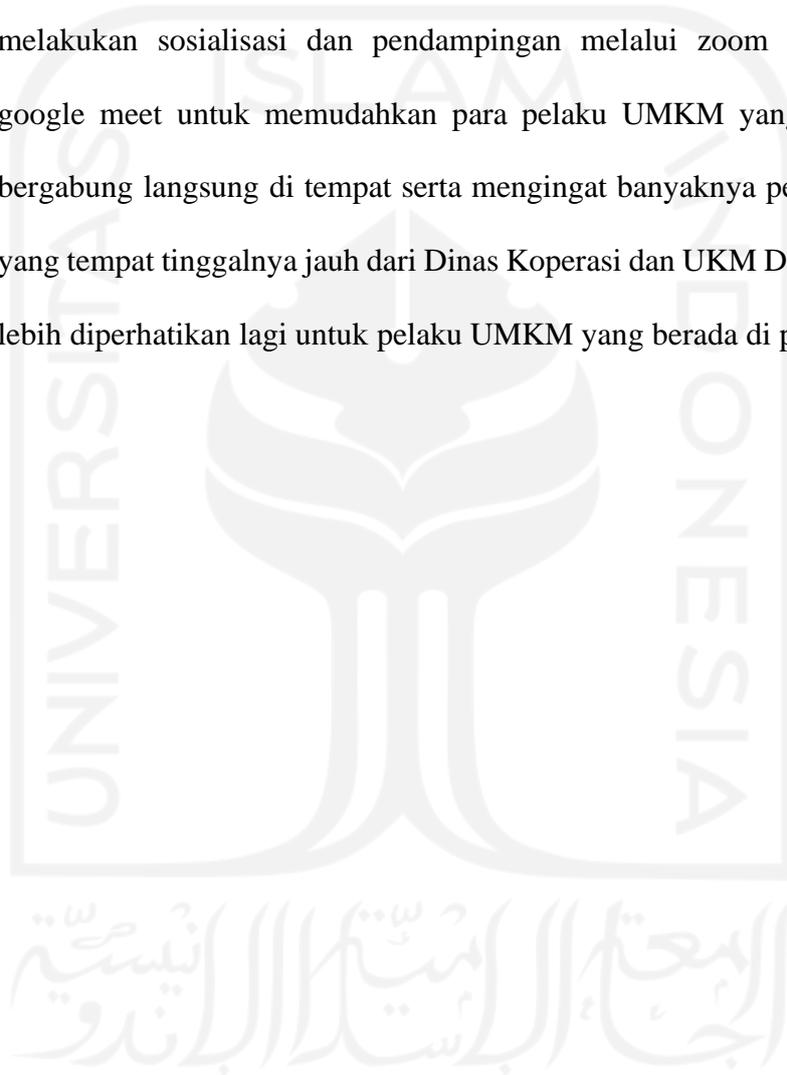
4.2 Saran

Dari beberapa uraian kesimpulan di atas maka dapat ditarik sebuah saran agar lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan di Dinas Koperasi dan UKM DIY, diantaranya:

1. Di masa pandemi ini banyak pelaku usaha yang mengalami krisis moneter, dan pemerintah juga telah meningkatkan plafon pinjaman berupa subsidi

pinjaman KUR untuk membantu masyarakat dalam melancarkan usahanya. Maka dari itu sebaiknya Dinas dapat meningkatkan target untuk pelaku UMKM yang mengaskes KUR.

2. Di era digitalisasi ini sebaiknya pihak Dinas Koperasi dan UKM DIY dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan melalui zoom meeting atau google meet untuk memudahkan para pelaku UMKM yang tidak dapat bergabung langsung di tempat serta mengingat banyaknya pelaku UMKM yang tempat tinggalnya jauh dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, sebaiknya lebih diperhatikan lagi untuk pelaku UMKM yang berada di pelosok.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan.* 09 Mei.
[https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka \(TPT\) Februari,kerja yang terdampak COVID-19.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari,kerja yang terdampak COVID-19.)
- Catriana, E. (2022). *Plafon KUR 2022 Naik; Ini Tips Pengajuan KUR bagi UMKM.* Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2022/02/01/153500326/plafon-kur-2022-naik-ini-tips-pengajuan-kur-bagi-umkm?page=all>
- Dinas Koperasi dan UKM DIY. (n.d.-a). *Layanan.* Retrieved April 4, 2022, from <https://diskopukm.jogjaprovo.go.id>
- Dinas Koperasi dan UKM DIY. (n.d.-b). *Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY.* Retrieved April 4, 2022, from <https://diskopukm.jogjaprovo.go.id>
- Dinas Koperasi dan UKM DIY. (n.d.-c). *Visi Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY.* Retrieved April 4, 2022, from <https://diskopukm.jogjaprovo.go.id>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85, 26 (2021).
[file:///C:/Users/User/Downloads/struktur dinas.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/struktur%20dinas.pdf)
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia.* Kementerian Investasi/BKPM.
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan.* 27 September 2021.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- KPPN Palangka Raya. (2019). *Mengenal Kredit Program Pemerintah.*
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2839-mengenal-kredit-program-pemerintah-kur-atau-umi.html>
- Lestari, A. (2021). *Analisis Kondisi Usaha Kecil di Masa Pandemi Covid-19 dan Strategi Pengembangan Usaha Kecil di Kota Jambi.* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Lifepal. (2021). *KUR adalah Kredit Usaha Rakyat.* 14 July 2021.

<https://lifepal.co.id/media/kur-kredit-usaha-rakyat/>

- Lisa Apriani. (2022). *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Plampang (Studi Kasus BRI Unit Plampang)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Monalisa S. Najoran, Joyce J. Rares, A. L. (2022). Efektivitas program bantuan pinjaman modal usaha oleh Bank BRI melalui kredit (KUR) pada pelaku usaha rumah makan di kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(115).
- Muhyiddin Muhyiddin, K. P. P. N. R. (2020). *Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Mulyati, A. (2022). *Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk [UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten]*. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8463>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7, 121 (2021). file:///C:/Users/User/Downloads/PP_Nomor_7_Tahun_2021.pdf
- Sitoro, S. (2022). Identifikasi dan Strategi Pengembangan UMKM di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. *Change Agent For Management Journal*, Vol 5(2), 19. <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/camjournal/article/view/636>
- Suci, Y. R. (2017). Development of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Suryanti, E., Lesmana, H., & Mubarok, H. (2021). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 60–72. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.117>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. 1.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan Sosialisasi KUR

